

**Pengaruh Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Ekonomi Regional di Kota
Pematangsiantar**

Rizky Febrian Saragih, Anugrah Ramanda Lubis, Muhammad Sendi, Tryana Ramadhany
Batubara, Juliana Nasution

Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara

rizkyfebrian0802@gmail.com, ramandaanugrah5@gmail.com, muhammadsendi19@gmail.com,
tryanabatubara@gmail.com, juliananasution@uinsu.ac.id

Abstract

This analysis is meaningful in order to know the effect of people development on regional economics performance in Pematangsiantar City. The analytical method used is a qualitative method in the form of descriptive, namely by using a method where the author analyzes the data obtained and describes through the events related to the problem. The results of this study show that there has been a very significant decline in the Development of Economic Growth in the City of Pematangsiantar at 2015-2020. Where that the degree of fiscal decentralization has an impact on economic growth. This is the impact of the degree of fiscal decentralization on economic development stating that the degree of fiscal decentralization has a negative effect on economic growth.

Keywords: Human Development, Performance and Regional Economy

Abstrak

Analisa ini bermakna agar mengetahui pengaruh pembangunan manusia pada kinerja ekonomi regional di Kota Pematangsiantar. Metode analisa yang digunakan adalah metode kualitatif berupa deskriptif yaitu dengan menggunakan suatu metode dimana penulis melakukan penganalisaan terhadap data yang didapatkan dan mendeskripsikan melalui peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Adapun Hasil penelitian ini bahwa menunjukkan terjadinya penurunan yang sangat signifikan pada majunya perkembangan perekonomian di Kota Pematangsiantar pada Tahun 2015-2020. Dimana bahwasannya derajat desentralisasi fiskal berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal ini yakni dampak derajat desentralisasi fiskal pada perkembangan ekonomi menyatakan bahwasannya derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: Pembangunan Manusia, Kinerja, dan Ekonomi Regional

PENDAHULUAN

Dampak dalam pembangunan masyarakat ataupun mutu SDM pada cara kerja ekonomi wilayah di Indonesia secara nyata telah ditelaah contohnya dari Garcia serta Soelistianingsih (1998) dan juga Wibisono (2001). Akan tetapi, kajian nyata di segi tidak searah, yakni dampak pada capaian pembangunan manusia pada cara kerja ekonomi wilayah masih tidak leluasa. Masih terbatasnya kajian nyata di segi ini sebenarnya juga menjadi dominan umum. Dalam penyampaian oleh Ramirez dkk (1998), studi-studi yang ada umumnya lebih menitikkan dalam dampak dari canggihnya pada mutu SDM pada perkembangan ekonomi, sebagaimana juga terlihat dari sejumlah studi yang dikatakan pada Meier serta Rauch (2000). Pendapat Ramirez dkk, kendati adanya keterkaitan 2 jalur (*twoways relationship*) antara investasi rakyat serta perkembangan ekonomi itu telah dikabulkan secara luas, tetapi hal-hal spesifik yang mengkaitkannya masih kurang diobservasi dengan teratur.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana adanya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan bisa dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan penyebab individual, penyebab keluarga, penyebab sub budaya, penyebab agensi, penyebab struktural.

KAJIAN TEORI

Pembangunan Manusia

Mengutip isi Human Development Report (HDR) pertama tahun 1990, pembangunan manusia adalah suatu proses untuk memperbanyak pilihan-pilihan yang dimiliki oleh manusia. Tidak sedikit dikatakan bahwasannya modal manusia (*human capital*) ialah satunya hal penting pada mekanisme perkembangan ekonomi. Dengan investasi rakyat yang bermutu, cara kerja ekonomi diyakini akan lebih baik. Mutu investasi rakyat ini semisalnya dipandang dari jenjang pengetahuan, kesehatan, maupun pendukung sebagainya, sebagaimana mampu dipandang pada bermacam berita pembangunan rakyat yang diinformasikan oleh Badan PBB dalam Peningkatan rakyat.

Dalam pertimbangan itu jadi pada rancangan memicu perkembangan ekonomi penting pula dilaksanakan pembangunan rakyat, termasuk pada konteks ekonomi regional. Bagian ini perlu sebab pelaksanaan pembangunan yang tidak mendorong naiknya mutu rakyat hanya akan menjadikan daerah yang terkait keterbelakangan dari daerah yang lain, tergolong dalam hal kinerja ekonominya. Pada maksud lain, kenaikan modal rakyat diinginkan juga akan menyalurkan kegunaan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah yakni permasalahan serius untuk negara dengan otonom yang luas serta jenjang berbagai macam sosial ekonomi yang tinggi. Antara investasi rakyat, serta perkembangan ekonomi sebenarnya terdapat kaitan yang saling mempengaruhi. Namun demikian kajian yang ada pada umumnya lebih memandang pengaruh investasi rakyat pada perkembangan ekonomi serta kurang menaruh perhatian dalam dampak dari perkembangan ekonomi pada harta rakyat (Ramirez, dkk, 1998).

Dengan makna lain, dampak pembangunan manusia pada perkembangan ekonomi akan lebih mendoktrin bila memang telah ada kebiasaan dalam menyongsong pengetahuan yang baik ditetapkan oleh metode pembangunan itu sendiri. Selain itu, dampak tidak negatif dari pembangunan manusia, akan kokoh bila adanya jenjang penanaman modal yang tinggi, menyalurkan pemasukkan yang lebih merata, dukungan dalam investasi sosial yang lebih baik, dan kebijakan ekonomi yang lebih mumpuni.

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia adalah ukuran cara kerja pembangunan manusia berdasarkan beberapa unsur *basic* mutu dalam keseharian. Penghitungan Indeks Pembangunan Manusia dalam pendukung pembangunan rakyat memiliki maksud sangat sungguh *important* yaitu: Mengembangkan pendukung yang menjadi tolak ukur dimensi fundamental pembangunan manusia serta tidak mempersempit pilihan. Teori modal manusia mengatakan bahwasannya pengetahuan merupakan sumber investasi sumber daya manusia, yang pada akhirnya menyalurkan tidak sedikit kegunaan yakni: sanggup menemukan pekerjaan yang lebih baik, bekerja secara efisien dan efektif, serta menaikkan kesejahteraan serta pemasukkan individu. IPM merupakan dimensi efek livabilitas wilayah yang bentuknya sangat besar karena menunjukkan kualitas masyarakat di wilayah tersebut dari segi harapan hidup, kecerdasan dan taraf hidup yang layak. IPM juga memainkan peran utama dalam pelaksanaan program pembangunan dan memastikan bahwa garis prioritas dan program pembangunan ditetapkan. Hal ini menjadi pedoman untuk membagi perhitungan sesuai dengan praktik standar yang ditetapkan oleh pengambil kebijakan dan pemilik cadangan (Sayifullah dan Gandasari, 2016).

Kemiskinan

Kemiskinan sulit untuk dimaknai sebab kemiskinan itu sendiri mempunyai bagian waktu serta wadah. Konsep kemiskinan di masa perang berbeda pada sekarang. Para ahli telah mencoba mengartikan kemiskinan serta mengelompokkan kemiskinan itu sendiri. Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana orang tidak dapat membayar keperluan pokok yakni makanan, pakaian yang layak, tempat tinggal serta obat-obatan (Alhudhori, 2017). Menurut Bank Dunia (Maipita, 2014), kemiskinan ialah kurangnya tempat tinggal, sakit serta ketidakmampuan untuk mengunjungi dokter, ketidakmampuan untuk pergi ke sekolah dan ketidakmampuan untuk membaca dan menulis. Kemiskinan juga ketika tidak punya pekerjaan, menjadi tidak berani melihat masa depan serta tidak menerima air bersih. Sederhananya, kemiskinan ialah kekurangan dari tidak sedikit bagian yang seringkali dinilai dari segi kesejahteraan. Negara berkembang serta negara terbelakang pada umumnya sangat mudah terjebak dalam siklus kemiskinan, dimana siklus kemiskinan tersebut terdiri dari rangkaian kekuatan siklus yang dapat bertindak serta bereaksi sedemikian rupa sehingga membuat negara miskin tetap berada pada kemiskinan.

Keterkaitan Pertumbuhan Ekonomi lewat Pembangunan Manusia dalam Rangka Mengurangi Kemiskinan

Menurut analisis (Cholili dan Hardjo, 2014), orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dikatakan sebagai orang miskin. Seiring dengan berkembangnya perekonomian di otonom tersebut, banyak pendapatan yang dikonsumsi, yang bila disalurkan dengan baik di antara warga wilayah itu, akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan maksud lain, pertumbuhan ekonomi secara teoritis memainkan peran penting dalam pengurangan kemiskinan. Pemerataan pendapatan masyarakat di daerah berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sejahtera.

Salah satu tugas mengukur distribusi pendapatan di suatu wilayah adalah mengukur tingkat kemiskinan wilayah tersebut. IPM yang representatif berpengaruh terhadap merosotnya jumlah rakyat miskin di daerah. Perhitungan Indeks Pembangunan Manusia menggunakan komponen komposit, diantaranya angka harapan hidup, angka melek huruf, serta konsumsi per kapita. Perbaikan pada kesehatan, pengetahuan serta pemasukkan per kapita mendorong pembangunan rakyat. Sehingga semakin tidak rendah mutu masyarakat di suatu wilayah, maka semakin sedikit penduduk menengah kebawah pada wilayah tersebut.

Pembangunan manusia ialah juga maksud pembangunan itu sendiri, menggambar *skill* suatu negara untuk mengadopsi teknologi modern serta mengembangkan kapasitasnya untuk menciptakan pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Menurut analisis Ketut serta Endrayani (Endrayani dan Dewi, 2016), perkembangan ekonomi berdampak negatif serta signifikan pada kemiskinan. Perolehan kajian dilakukan oleh Ningrum (Ningrum, 2017) menunjukkan bahwasannya dampak Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan bersifat negatif serta signifikan. Pengaruh IPM juga sejalan dalam analisis Mufidi (Cholili dan Hardjo, 2014), dimana analisis itu menggambarkan bahwasannya ketika IPM naik, pengurangan kemiskinan berpengaruh untuk peningkatan produktivitas tenaga kerja penduduk yang pada akhirnya menaikkan pendapatan.

Pertumbuhan Ekonomi

Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi merupakan kemajuan fungsi ekonomi yang mengarah pada peningkatan jasa dan barang yang dihasilkan oleh suatu masyarakat. Pertumbuhan ekonomi kadang-kadang diartikan sebagai perkembangan teratur kegiatan ekonomi yang mengarah pada peningkatan pendapatan nasional riil. Menurut Sukirno (2016), teori pertumbuhan ekonomi mencakup beberapa teori seperti:

1. Teori Pertumbuhan Klasik, menitikkan mengenai pentingnya factor-faktor produksi untuk meninggikan pendapatan nasional serta mengimplementasikan pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi yang terpenting dipantau pakar ekonom klasik dalam tenaga kerja

2. Teori Schumpeter menekankan peran wirausaha dalam berinovasi dan berinvestasi dalam mencapai perkembangan ekonomi.

3. Teori Harrod-Domar menggambarkan peran investasi ialah suatu penyebab peningkatan total pengeluaran. Pada dasarnya, teori ini menekankan peran sisi permintaan pada mencapai perkembangan.

4. Teori Neoklasik:

Teori ini berpendapat bahwasannya pertumbuhan teknologi serta kemampuan manusia ialah faktor terpenting untuk mencapai perkembangan ekonomi. Ada beberapa hal penting yang menetapkan perkembangan ekonomi (Rahayu, et al, 2016).

1. Unsur Sumber Daya Alam (SDA)
2. Unsur Pribadi
3. Unsur Ilmu Pengetahuan serta Teknologi (IPTEK)
4. Unsur Kebudayaan
5. Pembiayaan pada biaya awal

METODE PENELITIAN

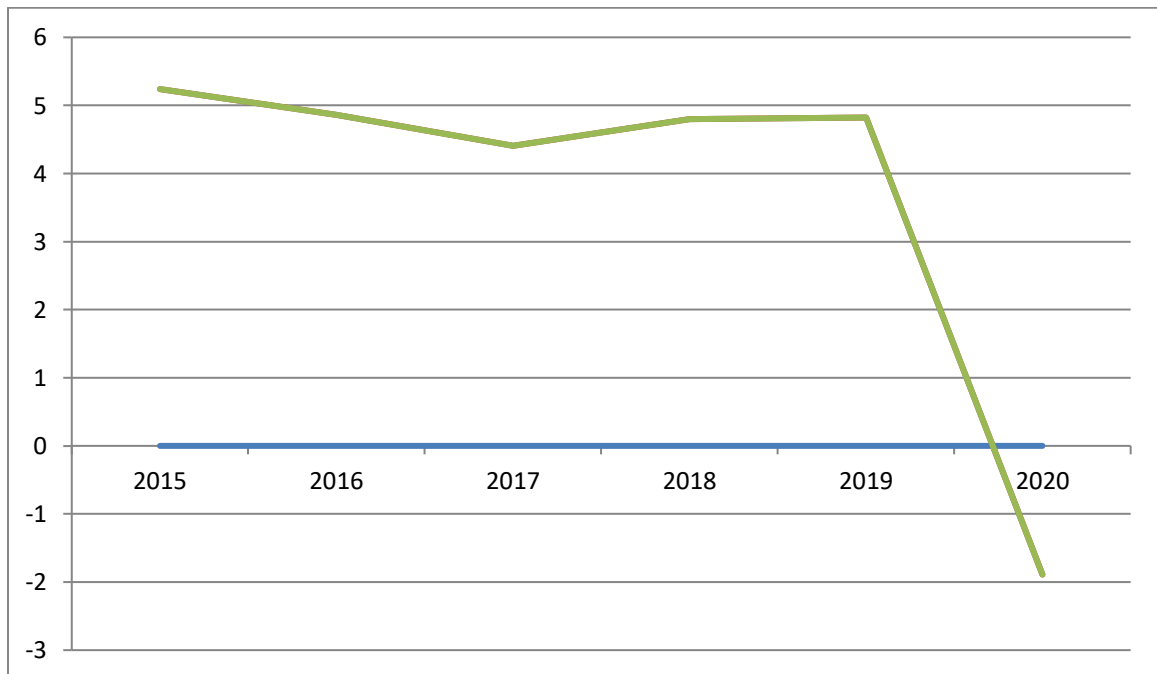
Data yang dipakai pada penelitian ini ialah data sekunder. Data sekunder ini ialah dokumen *time series* (periode) itu dihasilkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar periode 2015-2020. Dokumen yang diperlukan untuk penelitian ini adalah Dokumen Pertumbuhan Ekonomi Kota Pematangsiantar serta dokumen APBD Kota Pematangsiantar. Sebagai metode penelitian digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan suatu metode penelitian yang memberikan informasi yang nyata dan akurat. Berdasarkan fakta industri tentang dampak pembangunan manusia terhadap produksi ekonomi daerah di kota Pematangsiantar. Metode kepustakaan digunakan

sebagai sumber data, yaitu dengan mengumpulkan bahan pustaka, mengolah dan melestarikan bahan penelitian. (Zed, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ekonomi negara membutuhkan modal dari potensi ekonomi daerah dan transfer negara. Otonomi daerah dan desentralisasi pendanaan memberi pemerintah kota kekuatan untuk secara mandiri memutuskan peran pendapatan dan subsidi dalam pelaksanaan pembangunan arus utama. Dengan bantuan otonomi daerah dan desentralisasi ekonomi, pembangunan harus lebih merata sesuai dengan keinginan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan jelas menunjukkan perkembangan daerah yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut. Pendapatan nasional juga menjadi acuan dalam menilai situasi perekonomian negara (Basmar, dkk, 2021).

Indikator yang sangat penting untuk mengetahui status perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu, diantaranya adalah Produk Domestik Bruto (PDB) daerah tersebut. Kota Pematangsiantar merupakan diantara daerah di wilayah Sumatera Utara, dengan posisi strategis di Jalan Raya Trans-Sumatera. Pematangsiantar merupakan kota terbesar tidak pertama, tetapi kedua setelah Medan. Dari tahun 2015 hingga 2020, perkembangan ekonomi kota ini berkisar antara -1 persen hingga 6 persen seperti terlihat pada Gambar 1 di bawah ini:

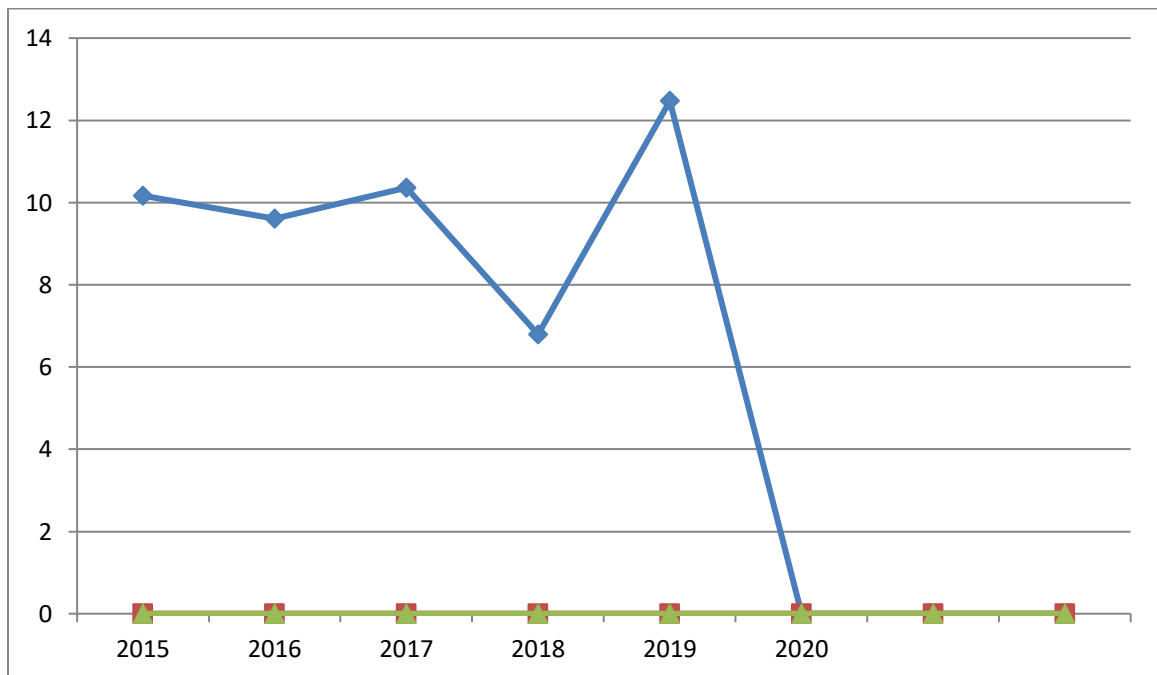


Gambar 1. Kemajuan Perkembangan Perekonomian di Kota Pematangsiantar pada Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar Tahun 2015-2020 (dokumen dikelola)

Kapasitas *economic* daerah merupakan salah satu ciri terpenting dalam pelaksanaan pembangunan, yang menunjukkan bahwa daerah dapat berdaya. Pemerintah daerah memiliki peluang

dan kebijakan untuk menggali potensi daerahnya masing-masing agar daerahnya memiliki aliran pendapatan asli daerah untuk membiayai pengeluaran keuangan pemerintah daerah (Muryawan et al. al., 2016). Diantara alat dalam mengukur kinerja ekonomi adalah derajat desentralisasi keuangan publik. Tingkat desentralisasi fiskal membandingkan dua variabel yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta jumlah atau keseluruhan pemasukkan asli daerah (TPD). Besar kecilnya PAD menetapkan besar kecilnya pengaruh PAD pada pendapatan otonom (Pasaribu et al, 2021). Selain itu, tarif pajak terdesentralisasi di kota Pematangsiantar mengalami perubahan dari 6% menjadi 12 % tahun 2015 ke tahun 2020, seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2: Degree of Fiscal Decentralization in Pematangsiantar City

Sumber: Badan Pusat Statistik Pematangsiantar Tahun 2015-2020 (dokumen dikelola)

Diyakini secara luas bahwasannya derajat desentralisasi keuangan mempengaruhi perkembangan ekonomi, yakni Alisman & Supriadi (2020), Lubis et al. (2017) dalam mendeskripsikan dampak derajat desentralisasi keuangan publik pada perkembangan ekonomi menggambarkan bahwasannya desentralisasi kebijakan fiskal berdampak bukan negatif pada pertumbuhan ekonomi. Kajian astut et al (2018), soleh et al (2018), dan saputra et al (2012), juga menggambarkan bahwasannya derajat desentralisasi pajak berdampak negatif pada pembangunan ekonomi.

KEMISKINAN KOTA PEMATANG SIANTAR TAHUN 2020

1. Pada Maret 2020 penduduk miskin berjumlah 8,27 %, lalu turun menjadi 0,36 % pada Maret 2019.
2. Pada Maret 2020 penduduk miskin berjumlah 21,33 ribu orang, naik 0,76 ribu orang pada Maret 2019.
3. Garis Kemiskinan (GK) di Maret 2020 tertulis bekisar Rp. 536.486,-/kapitas perbulan.

4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Maret 2020 sebesar 1,10 meningkat 0,40 poin dibanding Maret 2019.
5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) pada Maret 2020 sebesar 0,26 meningkat 0,16 poin dibanding Maret 2019

(Data diatas didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Pematangsiantar)

Keuangan Pematangsiantar pada tahun 2020 bila ditinjau tahun sebelumnya berkembang tidak positif senilai -1,89 %. Menurut pendekatan produksi, perkembangan tertinggi diperoleh dari lapangan usaha Pengadaan Listrik serta Gas senilai 2,24 persen. Diikuti oleh lapangan usaha Informasi serta Komunikasi senilai 2,00 % serta lapangan usaha Pertanian, Kehutanan serta Perikanan bekisar 1,05 %. Menurut pendekatan pengeluaran, unsur Pengeluaran *Konsumsi* LNPRT hingga perkembangan tertinggi yakni berjumlah 0,36 %. Tiga lapangan usaha yang menyalurkan kedudukan mencolok pada PDRB Pematangsiantar dari segi menghasilkan di tahun 2020 yakni: Perdagangan Besar serta Eceran; Perbaikan Mobil serta Sepeda Motor senilai 25,28 %, Industri Pengolahan senilai 21,51 % serta Konstruksi senilai 10,15 %. Namun, dari sisi pengeluaran, unsur Pengeluaran *Konsumsi* Rumah Tangga (PKRT) menyalurkan kontribusi sangat besar yakni senilai 58,54 %, menyusul unsur PMTB senilai 24,81 % sebagai indikator dengan kontribusi terbesar kedua. Secara nominal, PDRB Pematangsiantar tahun 2020 atas dasar harga mendudukin hingga Rp.13.920,09 miliar serta PDRB atas *basic of price* konstan 2010 hingga Rp.9.430,04 miliar.

Kota Pematangsiantar dengan IPM pada Tahun 2011-2015

Tahun	IPM
2011	73,61
2012	74,51
2013	75,05
2014	75,83
2015	76,34

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar

Unsur Penyusun Indeks Pembangunan Manusia di Kota Pematangsiantar pada Tahun 2011–2015

No.	Komponen Penyusun IPM <i>HDI Constituent Components</i>	2011	2012	2013	2014	2015
1.	AHH (Angka Harapan Hidup)/ <i>Life Expectancy Rate</i>	71,51	71,57	71,59	71,69	72,29
2.	Keinginan Lama Sekolah/ <i>Expectancy Years Schooling</i>	12,30	12,91	13,36	13,97	13,99
3.	Rata-rata Lama Sekolah/ <i>Mean Years Schooling</i>	10,43	10,62	10,62	10,70	10,73

4.	Beban per Kapita Diselaraskan/ <i>Adjusting Expenditure per Capita</i>	10,987	11,039	11,139	11,204	11,388

KESIMPULAN

Perwujudan ekonomi nasional memerlukan modal yang diperoleh dari potensi ekonomi daerah dan transfer negara. Lewat otonomi daerah serta desentralisasi perpajakan, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk secara mandiri menentukan peran pendapatan dan keuangan dalam pelaksanaan utama pembangunan. Dalam bantuan otonomi daerah serta desentralisasi fiskal, pembangunan harus lebih merata sesuai dengan keinginan pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang positif serta jelas merupakan indikasi pembangunan daerah yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan kemakmuran masyarakat di wilayah tersebut. Pendapatan nasional juga menjadi acuan dalam menilai situasi perekonomian negara (Basmar, dkk, 2021). Indikator yang sangat penting untuk mengetahui status perekonomian suatu daerah pada suatu periode tertentu, diantaranya ialah Produk Domestik Bruto (PDB) daerah tersebut. Kota Pematangsiantar merupakan diantara daerah lainnya wilayah Sumatera Utara, dengan posisi strategis di Jalan Raya Trans-Sumatera. Kota ini merupakan kota terbesar kedua setelah Medan. Selama periode 2015-2020, pertumbuhan ekonomi kota ini luar biasa -1 hingga 6%.

DAFTAR PUSTAKA

- Aloysius Gunadi Brata, *PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KINERJA EKONOMI REGIONAL DI INDONESIA*, Jurnal EKONOMI PEMBANGUNAN Kajian Ekonomi Negara Berkembang, Vol 7 (2) 2002
- Lora Ekana Nainggolan, 2021, *ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA YANG BERDAMPAK PADA KEMISKINAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA*, Binakwaya, Vol.15 (10)
- Alisman,dkk.,2020,Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Barat Selatan Provinsi Aceh Periode Tahun 2011-2019, EMT, Vol 4 (2).

Gultom,dkk.,2020,Analisis Kinerja Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Pematangsiantar. EKUILNOMI, Vol.2(1)

Arenawati,2014,Administrasi Pemerintah Daerah; Sejarah,Konsep dan penatalaksanaan di Indonesia, Edisi Pertama. (Yogyakarta: GRAHA ILMU)

Kharisma, Bayu,2013,Desentralisasi Fiskal Dan Pertumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia. JEL, Vol.14(2).

Damanik, Darwin, et al.,2021,Perekonomian & Bisnis Indonesia. (Makassar: Yayasan Kita Menulis).

Sutriani,dkk., *ANALISIS PENGARUH DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA PEMATANGSIANTAR*, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 7 (1), 2022.